



'Cabut IMB Hotel Berkedok Pondokan'

● SILVY DIAN SETIAWAN

Pemkot Yogya dinilai lalai dalam mengawasi perizinan.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta tidak hanya dinilai lalai dalam pengawasan perizinan bangunan. Namun juga lalai akan penegakan aturan dan melakukan pembiliran terhadap aktivitas hotel dengan izin mendirikan bangunan (IMB) yang notabene untuk pondokan.

"Kami melakukan pemantauan untuk sekian kalinya, nama bangunan tersebut @HOM Premiere Timoho. Dari hasil pemantauan diketahui ada 90 kamar dan kamar-kamarnya kami lihat di lantai tujuh setara dengan kelas hotel," kata anggota Foem Pemantau Independen Kota Yogyakarta (Forpi) Bidang Pemantauan dan Investigasi, Baharuddin Kamba, saat meninjau @HOM Premiere Timoho, Selasa (2/10).

Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk berani mencabut IMB dan izin pemondokan yang sejak awal pembangunannya tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Terlebih, lokasi bangunan tersebut tidak jauh dari Balai Kota Yogyakarta.

penyelenggaraan pondokan Kota Yogyakarta," kata Penanggungjawab Perizinan @HOM Premiere Timoho Yogyakarta, Rudi.

Ia mengungkapkan, saat ini bangunan seluas 3.966 meter persegi dengan total 90 kamar tersebut belum dioperasikan seratus persen. Namun, masih dalam tahap uji coba yang sudah dilakukan sejak September 2018. "Sudah ada yang mencoba, ada yang satu kerabat, satu keluarga," kata Rudi.

Terkait iklan yang muncul di berbagai aplikasi pemesanan hotel yang menyatakan bangunan tersebut sebagai hotel, ia membantah hal tersebut. "Kami masih tahap uji coba dan pengenalan. Makanya kemarin pada beberapa travel agent mengapa masuk hotel? Sementara kami kan pondokan," bantahnya.

Selain itu, ia juga mendesak Pemkot untuk tidak mengeluarkan izin seterusnya atas bangunan itu. Pun dengan investor yang memiliki kuasa atas bangunan tersebut agar masuk *blacklist* investor di Kota Yogyakarta.

Harga sewa per kamar yang mencapai Rp 300 ribu lebih per malamnya, juga dianggap tidak logis jika diperuntukkan sebagai pondokan. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah untuk memeriksa seluruh dokumen terkait proses perizinan bangunan itu.

"Termasuk gambar dari bangunan tersebut apakah sudah sesuai dengan permohonan izin atau tidak. Hal ini penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perizinan karena dari awal pengajuan ijinnya sudah bermasalah," lanjutnya.

Kemarin, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri menyebutkan ada kelalaian dari Pemkot Yogyakarta terhadap pengawasan perizinan. @HOM Premiere Timoho Yogyakarta, kata dia, awalnya memegang izin pendirian hotel dua lantai. Namun, karena melebihi ketentuan, izin berubah menjadi kos atau pondokan eksklusif.

"Kenyataan di lapangan tidak menunjukkan hal demikian. Pelanggaran atas aturan investasi dalam bentuk perizinan kerap terjadi dan salah satu contoh yang bisa dilihat adalah pelanggaran izin IMB yang diterbitkan atas bangunan yang diberi nama @ Home Premiere," kata Nasrul.

Bangunan tersebut, lanjutnya, bahkan dipromosikan sebagai hotel melalui aplikasi pemesanan hotel. Untuk itu, ia mendesak pemkot untuk mencabut izin bangunan tersebut. "Pemkot juga harus Membongkar bangunan itu bila terbukti tidak mengindahkan aturan perizinan di Kota Yogyakarta," lanjutnya.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta, Setiawan, membenarkan bangunan itu hanya mengantongi IMB yang diperuntukkan sebagai pondokan. Bukan sebagai hotel. "Tidak ada perubahan perizinan ke IMB hotel. Bagaimana pun juga, saat ini masih diberlakukan moratorium pemberian izin hotel baru di Yogyakarta. Sehingga kami otomatis tidak bisa menerbitkan IMB untuk hotel," katanya.

Sementara itu, pihak manajemen @HOM Premiere Timoho Yogyakarta berdalih pengoperasian bangunannya sudah sesuai dengan izin yang didapat yaitu sebagai pondokan. Pengakuan itu dikeluarkan setelah adanya dugaan bahwa bangunan tersebut dioperasikan sebagai hotel. Sementara izin yang dikantongi merupakan izin mendirikan bangunan untuk pondokan.

"Kita cukup mengacu pada izinnya sebagai pondokan. Ada surat izin

Oleh karena itu, pihak manajemen akan melakukan pembenahan sistem. Hal itu dilakukan guna meyakinkan masyarakat bahwa bangunan tersebut bukan hotel, melainkan pondokan. "Mungkin karena identik dari masyarakat (sebagai hotel) kami akan mengubah itu. Secara sistem akan kita benahi semua. Kita pun namanya @HOM. Kita mencoba meyakinkan masyarakat kalau itu tidak semata-mata hotel, tapi untuk pondokan," lanjutnya.

Media: ferman rahadi

Tindak Lanjut	
Secepatnya	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
Secepatnya	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
Secepatnya	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,
 P1t. Kepala
 Sekretaris
 Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Secepatnya	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 25 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005